

Analisis Fungsi Pengawasan Kinerja Kontraktor terhadap Pelaksanaan Proyek Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin

Ika Rakhmalina¹⁾

*¹⁾Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmadiyah Sekayu
Jalan Merdeka No. 531 Kelurahan Serasan Jaya Sekayu
Email : ika_rakhmalina1983@gmail.com¹⁾*

ABSTRACT

This study is entitled Analysis of the Performance Monitoring Function of Contractors on the Implementation of Road Projects at the Public Works and Bina Marga Office of Musi Banyuasin Regency. The purpose of this study is to determine the Contractor Performance Monitoring Function on the Implementation of Road Projects at the Public Works and Bina Marga Offices of Musi Banyuasin Regency. The research method used in this research is descriptive quantitative method. This study concludes, first the Supervision Function has been implemented well and effectively and has clarity in its implementation and sanctions determined in accordance with the agreement. Secondly, every year there are still projects that are not on time. Third, the Target / Performance of Road Projects in the Busi Marga Public Works Office of Musi Banyuasin Regency can be seen from the 6 performance measurement indicators carried out by the Musi Banyuasin Public Works Department, which are quite good, but the indicators for the availability of facilities and infrastructure for disaster have not been carried out properly because a priority.

Keywords : *monitoring performance, administration, project implementation and project targets*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Fungsi Pengawasan Kinerja Kontraktor Terhadap Pelaksanaan Proyek Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Kinerja Kontraktor Terhadap Pelaksanaan Proyek Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif diskriptif. Penelitian ini menyimpulkan, pertama Fungsi Pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif serta memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya dan sanksi yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Kedua, setiap tahun masih ada proses pengerjaan proyek yang tidak tepat waktu. Ketiga, Target/ Kinerja Proyek Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin dilihat dari 6 indikator pengukuran kinerja yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin, sudah cukup baik, namun indikator ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan belum dilaksanakan dengan baik disebabkan belum menjadi prioritas.

Kata kunci : *pengawasan kinerja, administrasi, pelaksanaan proyek dan target proyek*

1. Pendahuluan

Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. Pengelolaan tidak lepas dari faktor karyawan yang diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi pemerintah. Untuk itu diperlukan perkembangan peran dan fungsi pemerintah dibidang public service atau pelayanan publik agar bisa mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Demi tercapainya tujuan organisasi, karyawan merupakan asset utama organisasi dan mempunyai peran yang strategis didalam organisasi yaitu sebagai pemikir, perencana dan pengendali (pengawas) aktivitas organisasi. Dinas Pekerjaan Umum merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum, kehadirannya sangat berperan penting terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum.

Dalam konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan selfsupporting-nya organisasi daerah, Instansi Pekerjaan Umum mempunyai peran yang sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah, infrastruktur yang baik dan lengkap, akan memperlancar perekonomian daerah, begitu juga sebaliknya jeleknya infrastruktur akan menghambat perekonomian sehingga pembangunan di daerah menjadi lambat dan tidak berkembang.

Setelah diadakan penawaran dan pengawasan maka diadakan tender untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, salah satunya kegiatan pembangunan jalan. Dalam pembangunan jalan tidak langsung dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Tetapi dilakukan dengan tender/pelelangan, kemudian hasil tender tersebut akan dimenangkan oleh salah satu perusahaan atau CV. Adapun tata cara pelelangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 59 tahun 2010 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa dengan adanya kegiatan perkembangan pembangunan jalan tersebut diperlukan pengawasan yang berfungsi membantu memastikan apakah aktivitas yang dilakukan para pekerja (kontraktor) yang akan melaksanakan pembuatan dan perbaikan jalan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan / disepakati dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu dalam kegiatan pengawasan, juga diperlukan kelengkapan pemenuhan data administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan / perkembangan jalan tersebut untuk pertanggung jawaban atas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para kontraktor.

Pada kegiatan administrasi diperlukan pengawasan karena beberapa alasan berikut ini : pengawasan

digunakan untuk membuat standar prestasi yang dimaksudkan untuk menaikkan efisiensi dan menekan biaya. Pengawasan digunakan untuk mengamankan asset perusahaan dari kemungkinan pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan. Pengawasan digunakan untuk mengukur prestasi kerja karyawan.

Pengawasan digunakan untuk perencanaan dan penyusunan program kegiatan. Pengawasan administrasi mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan organisasi, namun pelaksanaannya tidak mudah. Pengawasan administrasi dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria diantaranya proses pengawasan telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu dari pekerjaan dapat digunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi.

Pelaksanaan proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2015-2017, bahwa pelaksanaan proyek selama tiga tahun hanya ada beberapa dari proyek yang mengalami masalah yaitu pada tahun 2016 terjadi 3 pemutusan kontrak yang disebabkan berbagai aspek dan permasalahan baik dari pihak rekanan maupun dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga itu sendiri seperti permasalahan sulitnya akses transportasi atau pengangkutan material atau bahan bangunan ke lokasi yang berdampak terjadinya perbedaan pembiayaan yang cukup jauh dari rencana anggaran biaya dan ada juga terjadi disebabkan pihak rekanan atau kontraktor kadang keberatan melanjutkan kontrak dikarenakan pada saat pelaksanaan proyek, pihak kontraktor merasa pesimis untuk bisa menyelesaikan proyek sesuai dengan kesepakatan, dan ada lagi cuma terjadi masalah kecil yaitu tidak tepat waktu penyelesaian proyek jalan dari tahun 2015 sampai 2017 yaitu di tahun 2015 sebanyak 3 proyek, 2016 sebanyak 1 proyek, dan 2017 sebanyak 4 proyek yang sebagian besar disebabkan kesulitannya pihak rekanan atau kontraktor dalam akses material, terjadinya kecelakaan kerja karyawan, dan ada juga disebabkan libur panjang seperti libur hari raya.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul yaitu: "Analisis Fungsi Pengawasan Kinerja Kontraktor Terhadap Pelaksanaan Proyek Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin".

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah pada uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana fungsi pengawasan kinerja kontraktor terhadap pelaksanaan proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan kinerja kontraktor terhadap Pelaksanaan proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan keilmuan untuk peneliti selanjutnya, terutama tentang pengawasan kinerja yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pada suatu perusahaan.

2. Secara Praktis

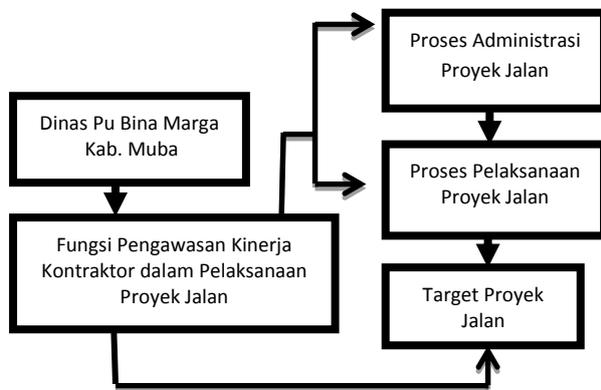
Menambah khasanah keilmuan khususnya manajemen sumber daya manusia, yang berkaitan dengan pengawasan kinerja kontraktor terhadap pelaksanaan proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pembahasan

A. Kerangka Pemikiran

Analisis untuk mengetahui pengawasan kinerja kontraktor terhadap pelaksanaan proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada kerangka konsep dibawah ini:

Secara sistematis kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

B. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ha1 : Fungsi pengawasan kinerja proyek berpengaruh signifikan terhadap proses administrasi proyek.
- Ha2 : Fungsi pengawasan kinerja proyek berpengaruh signifikan terhadap proses pelaksanaan proyek.
- Ha3 : Fungsi pengawasan kinerja proyek berpengaruh signifikan terhadap target proyek.

C. Tahapan Penelitian

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang membahas mengenai pengaruh “Fungsi Pengawasan Kinerja Kontraktor Terhadap Pelaksanaan Proyek Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin”, dengan tahapan penelitian sebagai berikut:

- 1. Kajian Pustaka, pada tahap ini melakukan pengumpulan literatur (buku, jurnal dan *browsing*)

mengenai pengawasan kinerja terhadap pelaksanaan kerja.

- 2. Analisis Masalah, pada tahap ini melakukan identifikasi dan penentuan masalah yang berhubungan dengan pengawasan kinerja terhadap pelaksanaan kerja.
- 3. Rancangan Instrumen Penelitian, melakukan perancangan pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan pengawasan kinerja terhadap pelaksanaan kerja.yang akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan.
- 4. Pengumpulan data, pada tahap ini melakukan observasi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin.
- 5. Analisa Data, data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analisa kualitatif diskriptif.
- 6. Penarikan Kesimpulan, dari hasil analisis data diambil kesimpulan hasil penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin.. Instansi ini beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin No. 236 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan

E. Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

Populasi juga sebagai sampel dalam penelitian ini. Objek yang diteliti yaitu Fungsi Pengawasan Kinerja Kontraktor Terhadap Pelaksanaan Proyek Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin

2. Variabel Penelitian.

Variabel-variabel penelitian ini meliputi pengawasan kinerja, proses administrasi, proses pelaksanaan dan target proyek.

F. Jenis dan Sumber Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sekaran (2009,p.77), mengemukakan jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (pimpinan) dan Kontraktor.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh penulis berupa keadaan umum Pekerjaan Umum Bina Marga dan laporan Penggunaan pelaksanaan proyek jalan.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan Penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian yang diperlukan menurut Sugiyono (2007,p.130) adalah :

1. Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan pihak-pihak yang dianggap membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip catatan-catatan dan laporan keuangan kemudian diolah menjadi data penunjang dalam pembahasan.

c. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala / peristiwa yang diselidiki pada obyek penulis.

b. Studi Kepustakaan

Studi keputakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui teori yang dipelajari pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, buku-buku, pedoman, dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian diolah dengan menggunakan teknis analisis kualitatif menurut Subagyo (2007,p.106), teknik analisis kualitatif adalah salah satu analisis yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi uraian yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan penjelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif diskriptif. Dari data dan uraian informasi dianalisis, sehingga mendapatkan penjelasan terhadap kondisi objek yang akan diteliti.

I. Hasil Pembahasan

Hasil penelitian dideskripsikan dengan indikator-indikator yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Fungsi Pengawasan Kinerja Kontraktor dalam Proses Administrasi Proyek Jalan.

Indikator dalam menganalisis fungsi pengawasan kinerja kontraktor terhadap pelaksanaan proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang pertama dilihat dari proses administrasi proyek jalan itu sendiri.

Adapun pengawasan yang dilakukan dari proses administrasi proyek jalan yang dilakukan di antaranya :

2. Kegiatan tender dari kegiatan yang akan dikerjakan/dilaksanakan.

a. Diberikan SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh PPK) : Terbitnya

- Gening/SPPBJ (Bank/Asuransi yang sesuai dengan kesepakatan)
- b. Kontrak (kesepakatan kedua pihak)
- c. Seluruh pihak terkait melakukan pemeriksaan lokasi kerja.
- d. Diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
- e. Pengambilan UMK (Uang Muka Kerja)
- f. Pengambilan Termin

Tabel 1. Tahapan Perincian Pembayaran Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Jalan Guna Pencairan Dana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

No	Pembayaran	Pembayaran (%)
1	Pembayaran UMK diberikan, dengan rincian sebagai berikut : - Kepada Pihak Kedua	20,00
2	Pembayaran pertama dilaksanakan apabila fisik telah mencapai 32,5%, di bayarkan 27,5% dari biaya pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut : - Kepada pihak kedua - Pengembalian Uang Muka	20,00 7,50
3	Pembayaran kedua dilaksanakan apabila fisik telah mencapai 65%, dibayarkan 27,5% dan biaya pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut : - Kepada pihak kedua - Pengembalian Uang Muka	20,00 7,50
4	Pembayaran ketiga dilaksanakan apabila fisik telah mencapai 85%, dibayarkan 25% dari biaya pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut : - Kepada pihak kedua - Pengembalian Uang Muka	20,00 5,00
5	Pembayaran keempat dilaksanakan apabila fisik telah mencapai 100%, dibayarkan 20% dari biaya pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut : - Kepada pihak kedua	20,00
Jumlah		100,00

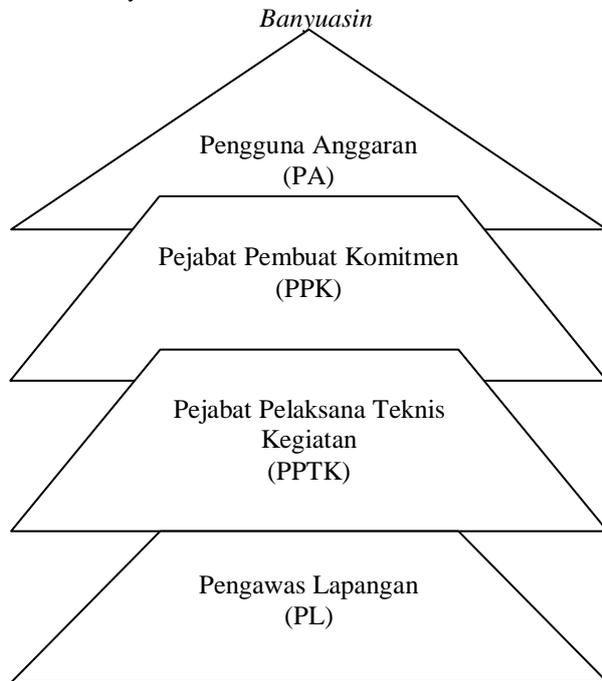
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, 2015

Dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa ada 8 (delapan) perusahaan yang mengalami perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu kerja ini disebabkan karena sebagian perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman barang, libur karena hari raya dan terjadi kecelakaan pegawai/ para pekerja dilapangan , sehingga para kontraktor melakukan perpanjangan waktu kerja. Untuk pengambilan dana terakhir/ termin ke 4 tidak bisa diambil karena untuk mengambilmnya harus dibuat dahulu penyerahan hasil pekerjaan pertama, baru membuat jaminan pemeliharaan, sedangkan pekerjaan belum selesai, sehingga para kontraktor bisa menerima jaminan

pemeliharaan. Setelah proyek selesai para kontraktor baru bisa menerima jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk langkah selanjutnya.

3. Fungsi Pengawasan Kinerja Kontraktor dalam Proses Pelaksanaan Proyek Jalan

Penyelesaian proyek jalan sangat bergantung dengan fungsi pengawasan yang di lakukan, untuk itu diperlukan pemahaman mengenai sistematis kerja proses penyelesaian proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin, berikut sistematisnya :



Gambar 2. Sistematis Alur Peran Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi

Dari gambar sistematis alur pengawas yang akan bekerja baik di lapangan ataupun di kantor yang bertanggung jawab dalam penyelesaian kegiatan perbaikan / pembangunan jalan yang ada Kabupaten Musi Banyuasin, perlu diketahui tingkat peran pengawas dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas berdasarkan pasal 11 Perpres Nomor 54 tahun 2010. Pasal 11 Perpres No.54 tahun 2010 ini diantaranya memuat sebagai berikut :

- a. Tugas dan peran Pengawas Lapangan / Pelaksana Kegiatan.
 - b. Tugas dan peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - c. Tugas dan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - d. Tugas dan peran Pengguna Anggaran (PA)
4. Target/ Kinerja Proyek Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015- 2017,

pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis dilakukan terhadap sasaran dengan indikator kinerja yang program dan kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2015-2017.

- a. Capaian indikator proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik dimana ditahun 2015 sebesar 34,25% dari target atau rencana sebesar 35% sehingga kinerja ditahun 2015 untuk indikator proporsi panjang jaringan jalan ditahun 2015 sebesar 97,86%, ditahun 2016 sebesar 34,19% dari target atau rencana sebesar 37% sehingga kinerja ditahun 2016 untuk indikator proporsi panjang jaringan jalan ditahun 2016 sebesar 92,41% dan ditahun 2017 sebesar 42,82% dari target atau rencana sebesar 39% sehingga kinerja di tahun 2017 untuk indikator proporsi panjang jaringan jalan ditahun 2017 sebesar 109,79%.

Dari tahun 2015-2017 bisa di lihat untuk capaian indikator proporsi panjang jaringan jalan sudah diatas 92% untuk setiap tahunnya yang dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Musi Banyuasin yang sebagian besar adalah dataran rendah yang mempengaruhi kontur tanah sehingga berdampak pada pondasi jalan yang dibangun maupun meingkatnya muatan dan dimensi berlebih dari kendaraan yang melintas yang tidak dapat dipantau dan pencegahan.

- b. Capaian Indikator pembangunan jalan desa dari tahun 2015 sepanjang 307,63Km dari target 131,14Km melewati RPJMD yang ditetapkan sehingga kinerja ditahun 2015 sebesar 234,58% hal ini disebabkan anggaran untuk perbaikan dan peningkatan jalan tersedia dan total untuk pencapaian pembangunan desa. Tahun 2016 sepanjang 205,12Km masih di bawah target RPJMD sepanjang 300Km sehingga kinerja ditahun 2016 sebesar 68,37% hal ini disebabkan anggaran untuk perbaikan dan peningkatan jalan diutamakan pada jalan strategis/jalan kabupaten dimana kondisi jalan strategis/ jalan kabupaten banyak mengalami kerusakan. Tahun 2017 sepanjang 112,2Km masih dibawah target RPJMD sepanjang 300Km sehingga kinerja ditahun 2015 sebesar 37,40% hal ini disebabkan anggaran untuk perbaikan dan peningkatan jalan diutamakan pada jalan strategis/ jalan kabupaten dimana kondisi jalan strategis/ jalan kabupaten banyak mengalami kerusakan.

Dari tahun 2015-2017 bisa dilihat untuk capaian indikator pembangunan jalan desa di tahun 2015 sudah melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan tapi ditahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan yang disebabkan anggaran lebih difokuskan pada pembangunan jalan di tempat strategis/ dijalan kabupaten yang pada tahun 2016 dan 2017 banyak mengalami kerusakan.

- c. Capaian indikator panjang jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk di tahun 2015 sepanjang 111,37Km. Capaian indikator tersebut masih dibawah target yaitu sepanjang 172,45Km sehingga kinerja untuk

tahun 2015 sebesar 64,58% dari target. Hal tersebut disebabkan pembangunan jalan lebih difokuskan pembangunan jalan desa. di tahun 2016 sepanjang 149,92Km. Capaian indikator tersebut diatas target yaitu sepanjang 60Km sehingga kinerja untuk tahun 2016 sebesar 249,87% dari target. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 anggaran untuk perbaikan atau peningkatan jalan diutamakan pada jalan strategis/ jalan kabupaten yang kondisi kerusakannya sudah cukup parah yang menyulitkan kendaraan untuk melaluinya dan waktu tempu yang lama sehingga mengakibatkan biaya tinggi dan distribusi barang/jasa terganggu. di tahun 2017 sepanjang 93,59Km. Capaian indikator tersebut diatas target yaitu sepanjang 60Km sehingga kinerja untuk tahun 2017 sebesar 155,98% dari target. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 anggaran untuk perbaikan atau peningkatan jalan diutamakan pada jalan strategis/ jalan kabupaten yang kondisi kerusakannya sudah cukup parah yang menyulitkan kendaraan untuk melaluinya dan waktu tempu yang lama sehingga mengakibatkan biaya tinggi dan distribusi barang/jasa terganggu.

Dari tahun 2015-2017 bisa dilihat untuk capaian indikator pembangunan jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk. Tahun 2015 tidak mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan pembangunan jalan lebih difokuskan pembangunan jalan desa. Tapi ditahun 2016 dan 2017 telah melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan yang disebabkan pada tahun 2016 dan 2017 anggaran untuk perbaikan atau peningkatan jalan diutamakan pada jalan strategis/ jalan kabupaten yang kondisi kerusakannya sudah cukup parah yang menyulitkan kendaraan untuk melaluinya dan waktu tempu yang lama sehingga mengakibatkan biaya tinggi dan distribusi barang/jasa terganggu.

- d. Capaian indikator panjang jembatan dengan kondisi baik tahun 2015 sebanyak 69 Unit yang masih belum mencapai target yaitu 261 unit sehingga kinerja untuk tahun 2015 dalam pencapaian indikator panjang jembatan dengan kondisi baik Cuma 26,44% dari target, hal ini disebabkan terget RPJMD terlalu tinggi. Panjang jembatan yang dibangun yang ingin dibangun tidak didukung dengan kondisi waktu pengerjaan, target yang terlalu tinggi disebabkan faktor usulan masyarakat melalui musrenbang dan didukung dan yang tersedia/disetujui serta untuk membuka akses desa-desa terpencil. Tahun 2016 sebanyak 27 Unit yang masih belum mencapai target yaitu 80 unit sehingga kinerja untuk tahun 2016 dalam pencapaian indikator panjang jembatan dengan kondisi baik cuma 33,75% dari target, hal ini disebabkan anggaran untuk pembangunan jembatan diutamakan pada jembatan strategis yang memerlukan anggaran yang besar dan waktu pengerjaan yang lama.
- e. Capaian indikator panjang jalan yang memiliki saluran drainase/ gorong-gorong tahun 2015 sebesar

1,09%, capaian indikator tersebut dibawah target RPJMD sebesar 5%,hal ini disebabkan sedikitnya kegiatan pembangunan drainase/ saluran pembuangan air baru, di tahun 2016 sebesar 1,23%, capaian indikator tersebut dibawah target RPJMD sebesar 6%,hal ini disebabkan pembangunan saluran drainase juga dikerjakan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin, di tahun 2017 sebesar 1,40%, capaian indikator tersebut dibawah target RPJMD sebesar 7%,hal ini disebabkan pembangunan saluran drainase juga dikerjakan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin.

- f. Capaian indikator tingkat ketersediaan sarana dan prasaran kebinamargaan tahun 2015 sebesar 32,8% capaian indikator tersebut di bawah target 50%, hal ini disebabkan tahun 2015 belum sepenuhnya sarana dan prasarana kebinamargaan ini menjadi prioritas dan setiap tahun akan terus ditingkatkan. Di tahun 2016 sebesar 0% capaian indikator tersebut di bawah target atau tidak ada penambahan, hal ini disebabkan tahun 2016 sarana dan prasarana kebinamargaan tidak bertambah atau tidak ada pengadaan sarana prasarana kebinamargaan. Tahun 2017 sebesar 33% capaian indikator tersebut di bawah target, hal ini disebabkan sarana dan prasarana kebinamargaan setiap tahun akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

5. Indikator Pengukuran Kinerja yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan indikator pengukuran kinerja, hasil analisis dari enam indikator pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

- a. Capaian indikator proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik selama tiga tahun terakhir yaitu 2016-2017 sudah mencapai lebih dari 92% dari target RPJMD yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin, dimana masing-masing pencapaiannya sebagai berikut :
- 1) Tahun 2015 mencapai 97,86% dari target RPJMD
 - 2) Tahun 2016 mencapai 92,41% dari target RPJMD
 - 3) Tahun 2017 mencapai 109,79% dari target RPJMD

hal ini disebabkan anggaran untuk perbaikan jalan dengan kondisi kerusakan jaringan jalan juga sesuai dengan yang disetujui dan dilihat juga dari kondisi geografis Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar dataran rendah yang mempengaruhi kontur tanah sehingga berdampak pada pondasi jalan yang dibangun maupun muatan dan dimensi berlebih dari kendaraan yang melintas yang tidak dapat dipantau yang mengakibatkan kondisi jalan mudah mengalami kerusakan.

- b. Capaian indikator pembangunan jalan desa yang dilakukan pada 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

- 1) Tahun 2015 mencapai 234,58% dari target RPJMD
 - 2) Tahun 2016 mencapai 68,37% dari target RPJMD
 - 3) Tahun 2017 mencapai 37,40% dari target RPJMD
- Hal ini disebabkan pada tahun 2012 pembangunan jalan masih berfokus terhadap pembangunan jalan desa sehingga ditahun 2015 indikator pengukuran pembangunan jalan desa melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 234,58%, sedangkan di tahun 2016-2017 anggaran lebih difokuskan pada pembangunan jalan di tempat strategis/ di jalan kabupaten yang banyak mengalami kerusakan, sehingga untuk pembangunan jalan desa ditahun 2016-2017 tidak mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan.
- c. Capaian indikator jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk ditahun 2015-2017 sebagai berikut :
- 1) Tahun 2015 mencapai 64,58 % dari target RPJMD
 - 2) Tahun 2016 mencapai 249,87% dari target RPJMD
 - 3) Tahun 2017 mencapai 155,98% dari target RPJMD
- Hal ini disebabkan pada tahun 2015 pembangunan jalan masih berfokus terhadap pembangunan jalan desa sehingga ditahun 2015 indikator jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk masih dibawah target RPJMD sebesar 64,58%, sedangkan di tahun 2015-2017 anggaran lebih difokuskan pada pembangunan jalan di tempat strategis/ di jalan kabupaten yang banyak mengalami kerusakan, sehingga untuk pembangunan jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk ditahun 2015-2017 melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan.
- d. Capaian indikator jembatan dengan kondisi baik di tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut :
- 1) Tahun 2015 mencapai 26,44% dari target RPJMD
 - 2) Tahun 2016 mencapai 33,75% dari target RPJMD
 - 3) Tahun 2017 mencapai 27,37% dari target RPJMD
- Hal ini disebabkan pada tahun 2015-2017 pembangunan jembatan masih dibawah target disebabkan anggaran untuk pembangunan jembatan diutamakan pada penyelesaian pembangunan jembatan strategis yang memerlukan anggaran yang besar dan dalam pembangunan jembatan yang strategis proses pengerjaannya juga dianggarkan selama beberapa tahun sehingga berdampak kepada tidak tercapainya target RPJMD yang telah ditetapkan.
- e. Capaian indikator panjang jalan yang memiliki drainase/gorong-gorong pada tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut :
- 1) Tahun 2015 mencapai 21,80 dari target RPJMD
 - 2) Tahun 2016 mencapai 20,50 dari target RPJMD
 - 3) Tahun 2017 mencapai 20,00 dari target RPJMD
- Hal ini disebabkan ditahun 2012 masih sedikitnya rencana kegiatan pembangunan drainase/ saluran pembuangan air baru dan pembangunan saluran

- drainase juga dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin.
- f. Capaian indikator tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan pada tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut :
- 1) Tahun 2015 mencapai 65,60 % dari target RPJMD
 - 2) Tahun 2016 mencapai 0% dari target RPJMD
 - 3) Tahun 2017 mencapai 47,14% dari target RPJMD
- Hal ini disebabkan ditahun 2015 belum sepenuhnya sarana dan prasarana kebinamargaan ini menjadi prioritas dan setiap tahun akan terus ditingkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan sedangkan ditahun 2013 tidak bertambah atau tidak ada disebabkan pengadaan sarana prasarana kebinamargaan memang tidak ada pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan dan ditahun 2017 Cuma mencapai 47,14% disebabkan sarana dan prasarana kebinamargaan setiap tahun akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Fungsi Pengawasan Kinerja Kontraktor dalam Proses Administrasi Proyek Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2015-2017 sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif serta memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya dan sanksi yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan pihak Rekanan atau Kontraktor dan pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin
2. Fungsi Pengawasan Kinerja Kontraktor dalam Proses Pelaksanaan Proyek Jalan yang dilaksanakan dari tahun 2016-2017 sudah dikerjakan dengan baik dan efektif walaupun dalam setiap tahun masih ada proses pengerjaan proyek yang tidak tepat waktu seperti ditahun 2015 ada 3 kasus keterlambatan / ketidak tepatan waktu dalam pengerjaan, ditahun 2016 ada 1 kasus dan di tahun 2017 ada 4 kasus ketidak tepatan waktu penyelesaian tetapi alasan yang menjadi penyebab keterlambatan/ ketidaktepatan waktu pengerjaan bisa dipahami oleh kedua pihak seperti:
 - a. Pihak kontraktor mengalami keterlambatan pengiriman barang
 - b. Libur karena hari raya dan
 - c. Terjadi kecelakaan pegawai/ para pekerja dilapangan

Untuk kasus putus kontrak Cuma terjadi 1 kasus selama 3 tahun terakhir yaitu ditahun 2016 dan itu disebabkan sulitnya memasuki bahan baku ditempat melaksanakan pekerjaan dan sudah di tinjau dan di dokumentasikan untuk laporan kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan ketentuan dan kesepakatan kedua pihak.

3. Target/ Kinerja Proyek Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin dilihat dari 6 indikator pengukuran kinerja yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin
 - a Indikator pembangunan jalan dalam kondisi baik sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum selama 3 tahun terakhir yang dibuktikan dari 3 tahun terakhir kinerja atau capaian selalu melebihi 92% dari target yang ditetapkan
 - b Indikator pembangunan jalan desa sudah berjalan dengan baik ditahun 2015 yang mencapai 234,58% dari target yang ditetapkan, walaupun ditahun 2016 dan 2017 masih dibawah target yang ditetapkan tetapi alasannya disebabkan pembangunan ditahun 2015-2017 berfokus pada pembangunan jalan strategis / kabupaten.
 - c Indikator pembangunan jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk juga sudah berjalan dengan baik yang walaupun ditahun 2015 belum mencapai target yaitu 64,58% yang disebabkan pembangunan jalan pada tahun 2015 di fokuskan ke pembangunan jalan desa
 - d Indikator pembanguan jembatan dalam kondisi baik belum begitu terlaksana sesuai target yang ditetapkan yang disebabkan dalam pengerjaan proyek jembatan untuk 3 tahun terakhir di fokuskan pada pembangunan jembatan strategis yang membutuhkan anggaran yang besar dan proses pengerjaan yang cukup lama sehingga pembangunan jembatan dianggarkan lebih dari satu tahun anggaran
 - e Indikator pembangunan panjang jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air belum terlaksana dengan baik disebabkan sedikitnya rencana dalam pembangunan jalan yang memiliki drainase serta pembangunan saluran drainase juga dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin.
 - f Indikator ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan belum dilaksanakan dengan baik disebabkan belum menjadi prioritas dan setiap tahun ketersediaan sarana dan prasarana akan terus ditingkatkan.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan atau bahkan meningkatkan Fungsi Pengawasan dalam Proses Administrasi Proyek yang dilaksanakan.
2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan atau bahkan meningkatkan Fungsi Pengawasan dalam Proses Pelaksanaan / Pengerjaan Proyek yang ditetapkan untuk memastikan diperiode yang akan datang kasus ketidaktepatan waktu pengerjaan dan pmutusan

kontrak semakin berkurang atau malah tidak terjadi lagi.

3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin harus mengevaluasi ketetapan target yang ingin dicapai setiap tahunnya yang disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga dalam pengukuran kinerja dimasa yang akan datang akan lebih efektif dan sesuai dengan pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, Malayu. 2008. Dasar Pengertian dan Masalah Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Manullang. 2006. Dasar-Dasar Manajemen, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi dan Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.
- Nuraida, Ida. 2008. Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta : Kanisius.
- Peraturan Musi Banyuasin Nomor : 47 tahun 2008, Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PRT/M/2009 Tentang Mekanisme Pencairan Dana.
- Schermerhorn. John R. JR.2002. Manajemen Umum, Edisi pertama, Yogyakarta : Rineka Cipta
- Sekaran. 2009. Metodologi penelitian, Jakarta : Rineka Cipta
- Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. 2006. Akuntansi Pemerintah Dengan Sistem Dana. Edisi Kedua. Yogyakarta : BPEE.
- Subagyo Joko. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Sukoco, Munir Badri. 2005. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern. Jakarta: Erlangga
- Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. Pengantar Manajemen, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta : Prenada Media..
- Terry, R George dan Leslie W, Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanto, Dian. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta : Bandung : Pustaka Setia.
- Yasin, Nazakhan. 2009. Manajemen Administrasi Proyek. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.